Laporan Kegiatan Initiative Diseminasi INDONESIA 2024
”Anomali’ Pertumbuhan Ekonomi Triwulan-II 2025 Indonesia”

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Selasa, 19 Agustus 2025
Narasumber	1. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2. Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Ringkasan

Pada hari Kamis, 19 Agustus 2025, TII mengadakan diskusi dengan tajuk ” Anomali’ Pertumbuhan Ekonomi Triwulan-II 2025 Indonesia” yang diisi oleh Putu Rusta Adijaya dan Esther Sri Astuti.

Diskusi dibuka oleh Putu Rusta Adijaya yang menyoroti persoalan anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Putu mempertanyakan mengapa angka pertumbuhan yang diumumkan BPS sebesar 5,2 persen justru dianggap anomali, termasuk oleh lembaga riset seperti Indef. Ia menekankan bahwa ketidaksesuaian ini menarik, sebab Indef memperkirakan pertumbuhan hanya 4,8 persen, sementara lembaga lain memperkirakan 4,7–4,9 persen. Bahkan, lembaga internasional pun cenderung memprediksi angka di bawah 5 persen.

Menurut Putu, kondisi riil ekonomi justru tidak sepenuhnya mendukung angka pertumbuhan setinggi itu. Data menunjukkan adanya penurunan konsumsi, melemahnya investasi, serta ketidakstabilan ekonomi dan politik eksternal. Dengan latar belakang ini, capaian 5,2 persen terlihat janggal. Putu kemudian melontarkan pertanyaan lanjutan: sebenarnya di mana letak anomali data pertumbuhan ekonomi tersebut?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Esther menjelaskan bahwa indikator makro justru bergerak negatif. Konsumsi rumah tangga, ekspor, hingga penjualan kendaraan mengalami penurunan. Selain itu, optimisme masyarakat terhadap pendapatan juga merosot, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tarif impor era Trump yang membebani perdagangan global.

Putu menambahkan bahwa BPS memang memberikan klarifikasi dengan menyatakan mereka menggunakan lebih banyak variabel dalam perhitungan. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan baru di masyarakat: sejauh mana metode tersebut mencerminkan realitas? Esther menegaskan

bahwa seorang peneliti seharusnya mampu mengeluarkan angka yang merepresentasikan kondisi nyata. Jika hasil berbeda dengan realitas di lapangan, maka yang perlu dilakukan adalah mempertanyakan kembali metodologi, bukan mencari pembenaran. Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dihitung dari komponen I + C + G, dengan penekanan pada akumulasi kapital, transfer teknologi, dan pembangunan human capital.

Diskusi kemudian mengerucut pada permasalahan fundamental pembangunan Indonesia. Putu menyoroti rendahnya kualitas human capital akibat pendidikan yang belum memadai serta rendahnya tingkat kebebasan ekonomi. Menurutnya, bagaimana masyarakat bisa beraktivitas ekonomi dengan bebas jika justru banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)? Esther menanggapi bahwa dalam 10 tahun terakhir, anggaran untuk pendidikan relatif stagnan dan porsinya terhadap PDB masih rendah. Jika Indonesia hanya mengalokasikan 2–3 persen, Malaysia sudah jauh lebih tinggi, apalagi Singapura.

Putu melanjutkan bahwa permasalahan tidak hanya pada human capital, tetapi juga pada budaya birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal ini. Karena itu, pendekatan investasi seharusnya tidak lagi konvensional, seperti sekadar membuat pameran di luar negeri, melainkan dengan memanfaatkan teknologi. Calon investor kini mencari informasi melalui internet, sehingga kualitas website resmi, penyediaan informasi dalam bahasa Inggris, serta kemudahan akses menjadi faktor penting.

Selain itu, persoalan keterampilan tenaga kerja domestik juga menjadi kendala. Banyak keterampilan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendorong perusahaan asing merekrut tenaga kerja dari luar negeri. Karena itu, transfer knowledge perlu diformalkan dalam bentuk regulasi agar tenaga kerja lokal bisa naik kelas.

Diskusi juga menyinggung persoalan integrasi data nasional yang masih terkendala oleh ego sektoral antar lembaga. Menurut Putu dan Esther, permasalahan besar Indonesia adalah lemahnya sistem database yang seharusnya menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan.

Sebagai penutup, para pembicara menekankan pentingnya evidence-based policy. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Jika angka pertumbuhan ternyata kecil, tidak masalah asalkan benar-benar mencerminkan kondisi riil. Dengan begitu, kebijakan yang

dihasilkan tidak hanya menjadi angka statistik semata, melainkan juga berlandaskan pada realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat.